

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Afifi, Subhan dkk, *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, Yogyakarta, 2005.

Amos, H.F. Abraham, *Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis dan Empiris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, 2005.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia – Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kesembilan, 2005.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ismawan, Indra, *Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Edisi Kelima (Revisi), Cetakan Keenam, Malang, 2004.

Marbun, S.T. dan Moh. Mahfud, M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2004.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Keenam, 2000.

Mubarok, M. Mufti, *Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*, Java Pustaka Media Utama, Surabaya, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Edisi II, 1998.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi III, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Salossa, Daniel S, *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005

Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, 2000.

Silaban, Sintong, *Tindak Pidana Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, 1992

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keenam, 2005.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga, 2006.

Syaukani, H.R., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Wijadjaja, A.W., *Titik Berat Otonomi DaerahTingkat II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

B. Makalah:

Jaweng, Robert Endi, “Catatan Kritis atas Pilkada Langsung”, *Sinar Harapan*, 17 Oktober 2003.

Nugraha, Arynta, “Pilkada Langsung, Demokrasi Lokal dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah”, dalam *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Subhan Afifi dkk, Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, Yogyakarta, 2005.

Santosa, Purwo, “Peta Jalan untuk Pengembangan Akuntabilitas Pemeruintahan Daerah Pasca Pilkada Langsung”, dalam *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, Yogyakarta, 2005.

Santoso, Topo, “Jebakan-jebakan Pilkada”, *Republika*, 9 Oktober 2004.

Soeprapto, Adi, “Pilkada Langsung dan Pengembang Ekonomi Daerah”, dalam *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Subhan Afifi dkk, Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Pers, Yogyakarta, 2005.

C. Web-Site:

www.fajar.co.id, Haris, Andi, “Dilema Demokrasi Pasca Pilkada”, Tanggal 22 Agustus 2005.

www.mediaindo.co.id, “Perundang-undangan Pilkada Tidak Tegas, Pelaku Politik Uang Sulit Dijerat”, Tanggal 4 Juli 2005.

www.republika.co.id, “Pelaku Politik Uang Tak Bisa Dijerat”, Tanggal 4 Juli 2005.

www.suarakarya-online.com, Fikri, Ali, “Evaluasi Pilkada – Menyoal Payung Hukum Peredam Konflik”, Tanggal 30 Agustus 2005.

D. Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.